

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA TOBELOS KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dandres Dolosi
Salmin Dengo
Helly Kolondam

The purpose of this research is to know the effectiveness of village administration administration in Tobelos Village, Ibu Hal District West Halmahera District. This research uses quantitative approach method. The effectiveness of village administration administration is seen from the three indicators of organizational effectiveness proposed by Gibson that is production, efficiency, and adaptation or flexibility. The researcher is the Village Head, Head of Administration Affairs, Head of Development Affairs, Chairman of BPD, Chairman of LPM, Chairman of RT 02, and a community figure, totaling 7 people. Data was collected using interview guidelines, while the analytical technique used was interactive model analysis from Miles and Huberman. Based on the result of data analysis, it is concluded that the effectiveness of administration administration of Tobelos village seen from the indicator of production, efficiency, and adaptation / flexibility is still not good. Based on the results of research can be recommended suggestions: 1. Quality of human resources of village heads and village apparatus needs to be improved through training or upgrading. 2. The sources of village government's financial revenue such as ADD and other sources of revenue mandated in Law No. 6 Year 2004 should be optimized. 3. Village Heads and Village Devices should be provided with a fixed income and adequate allowances. 4. Working facilities at village head offices need to be adequately provided for the smooth implementation of village apparatus tasks.

Keywords: *Effectiveness, Administration, Village Government.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, merupakan masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang. Sebuah panitia khusus mengenai masalah-masalah administrasi negara PBB menyatakan bahwa salah satu ciri yang menonjol dari negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah kelemahan-kelemahan administrasi pemerintahannya Bryant dan White, (1985). Milton Esman *dalam* Riggs, (1994) juga menyatakan bahwa sesungguhnya banyak diantara negara-negara sedang berkembang telah menggunakan sistem administrasi negara/pemerintah dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program kegiatan, tetapi negara-negara sedang berkembang masih penuh dengan gambaran ketidakmampuan administrasinya.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masalah lemahnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif di negara-negara sedang berkembang erat kaitannya dengan lemahnya

kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan perannya. Fenomena seperti ini tentu juga dapat ditemui dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai kelurahan dan desa.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu (UU. Nomor 32 Tahun 2004) pengaturan mengenai desa dan pemerintahan Bab XI pasal 200 s/d 216), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya sejak tahun 2014 desa dan pemerintahan desa diatur dengan undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang.No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara efektif masih merupakan salah permasalahan yang dapat ditemui di banyak desa-desa di Indonesia, antara lain di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Salah satu permasalahan utama adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) umumnya berpendidikan yang kurang memadai (tamatan SLTA ke bawah), kurang memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola administrasi pemerintahan desa secara efektif. Kondisi ini diparah lagi dengan kurangnya pengalaman para aparatur pemerintah desa di bidang administrasi pemerintahan desa.

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Tobelos adalah tidak memadainya prasarana dan sarana pendukung, seperti : kondisi kantor kepala desa kurang/tidak representatif untuk menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara efektif, sarana dan peralatan kantor masih sangat minim, dan fasilitas lain penunjang pelaksanaan tugas masih sangat terbatas.

Selain kedua permasalahan tersebut, masalah lain adalah sumber keuangan desa untuk membiayai penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih sangat terbatas di Desa Tobelos. Sumber-sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 72) yaitu : pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan

Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; hal itu belum sepenuhnya terwujud sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah desa tidak punya dana atau anggaran yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa tersebut perlu dikaji melalui penelitian sehingga penulis terdorong memilih judul penelitian “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari istilah bahasa Inggris “*effectivity*” atau “*effectiveness*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, (2000), efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang Undang-Undang/peraturan). Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya : (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti : manjur; mujarab; mempan; dan (2) Penggunaan metode / cara, sarana / alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Konsep Administrasi Pemerintah

Istilah “administrasi” yang dikenal di Indonesia sebenarnya berasal dari dua istilah yang berbeda. Istilah administrasi yang pertama ialah berasal dari kata Latin “*administrare*” yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Istilah *administrare* ini dalam bahasa Inggris disebut “*administration*” yang di Indonesiakan menjadi administrasi. Istilah administrasi (*administration*) ini oleh Miftah Thoha (1998) diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Siagian (2000) mendefinisikan istilah administrasi (*administration*) ini sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pfiffner dan Prestus dalam The Liang Gie, (1992) mendefinisikan administrasi (*administration*) adalah pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber berupa tenaga manusia dan benda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Istilah pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut "*government*". Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah pemerintah mengandung arti "kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah", sedangkan pemerintahan mengandung arti "perbuatan memerintah". Inu Kencana (2003) menjelaskan bahwa "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara; sedangkan "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Suradinata (dalam Inu Kencana) mengartikan pemerintahan adalah lembaga-lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian Administrasi Pemerintahan

Pengertian administrasi pemerintahan pada dasarnya bertolak dari pengertian administrasi dan pengertian pemerintahan itu sendiri. Seperti dikekatkan oleh Dwigth Waldo dalam Tjokroamidjojo, (2002), bahwa administrasi pemerintahan adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Charles Haines dalam Handyaningrat, (1999) juga mengemukakan bahwa administrasi pemerintahan berarti juga penerapan manajemen dan menentukan haluan daripada badan eksekutif (pemerintah), yaitu aparatur pemerintah serta fungsi-fungsinya.

Konsep Administrasi Pemerintah Desa

Bertitik tolak kepada pengertian administrasi pemerintahan yang telah

dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan apa yang dimaksudkan dengan administrasi pemerintahan desa disini ialah rangkaian kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang (aparatur/perangkat pemerintah desa) untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan kata lain, administrasi pemerintahan desa adalah kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Konsep Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa administrasi pemerintahan desa ialah rangkaian kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang (aparatur/perangkat pemerintah desa) untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan kata lain, administrasi pemerintahan desa adalah kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan pemerintah desa mencaai tujuan yang ditentukan sehubungan dengan tugas dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2006) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams dalam Moleong, (2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik

secara alamiah. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus Moleong, (2006).

Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan desa yang telah ditetapkan. Efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa diamati dari tiga criteria efektivitas yaitu : produksi atau hasil, efisiensi, dan adaptasi/fleksibilitas. Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Produksi, yaitu pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran;
- b. Efisiensi, yaitu ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan.
- c. Adaptasi atau fleksibilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul.

Jenis Data dan Informan Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen dan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan

ialah *content*, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Karena itu teknik pengambilan atau penentuan informan/sumber data yang tepat adalah teknik *purposive* yaitu pengambilan informan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu Sugiono, (2006).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen kunci/utama (*key instrumen*). Lanjut menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data primer yang terkumpul melalui wawancara diolah dan dianalisis dengan metode/teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah analisis model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto, (1992). Menurut Miles dan Huberman, analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa fokus yang diamati/diteliti adalah efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan penyelenggaraan administrasi

pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan desa yang telah ditetapkan. Efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa diamati dari tiga kriteria efektivitas yaitu : produksi atau hasil, efisiensi, dan adaptasi/fleksibilitas. Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Produksi, yaitu pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran; b. Efisiensi, yaitu ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan; dan c. Adaptasi atau fleksibilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul.

Sesuai dengan batasan dan definisi fokus penelitian tersebut disusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan para informan (lihat lampiran 1). Hasil reduksi data wawancara dengan para informan dikemukakan sebagai berikut :

1. Produksi

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “produksi” (pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran

2. Efisiensi.

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “efisiensi” (ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM, biaya, dan sarana/fasilitas kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan),

3. Adaptasi/Fleksibilitas

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “adaptasi/fleksibilitas” (kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul),

Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka bahwa konsep efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilihat dari pendekatan teori sistem. Pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Dalam pandangan teori sistem, organisasi dilihat sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Organisasi mengambil *input* dari sistem yang lebih luas (yakni lingkungan), kemudian memproses *input-input* itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (*output*). Oleh karena itu menurut pendekatan teori sistem bahwa kriteria efektivitas organisasi harus menggambarkan seluruh siklus *input – proses – output*, tidak hanya *output* saja, dengan kata lain kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu tempat hidupnya organisasi. Dalam pendekatan teori sistem ini kriteria efektivitas organisasi dapat mencakup beberapa indikator seperti : produksi, efisiensi, adaptasi/fleksibilitas, kepuasan, perkembangan, dan lainnya Gibson, dkk, (2002).

Berdasarkan teori sistem tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilihat dari tiga kriteria/dimensi indikator yaitu : produksi, efisiensi, dan adaptasi/fleksibilitas. Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dirangkum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Produksi

Indikator produksi melihat pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran. Artinya, efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilihat dari keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan dan merealisasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan

pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Rencana program/kegiatan pemerintah desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam RKP-Desa pada setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam musyawarah desa. (2) Pelaksanaan dan realisasi atau capaian hasil program di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal. (3) Pelaksanaan dan realisasi atau capaian hasil program dibidang pembangunan desa belum optimal. Program pembangunan yang sudah direncanakan seringkali tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula, program pembangunan yang dilaksanakan sering tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. (4) Program di bidang pembinaan kemasyarakatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, dan hasil-hasil yang dicapai masih kurang. (5) Program di bidang pemberdayaan masyarakat desa belum banyak yang dapat dilaksanakan, dan hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat setempat.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Tobelos dilihat dari kriteria/indikator produksi nampaknya belum optimal atau dapat dikatakan masih kurang optimal. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa dan informan lain yang diwawancarai bahwa belum optimalnya produktivitas pemerintah desa disebabkan terutama oleh kualitas SDM aparat desa masih rendah, dana/keuangan pemerintah desa masih minim, dan sarana kerja masih sangat tidak memadai. Oleh karena itu, ke depan harus dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas SDM aparat desa, dana/keuangan desa, dan sarana kerja bagi pemerintah desa.

2. Efisiensi

Konsep efisiensi mengandung pengertian sebagai rasio atau perbandingan antara output

dengan input, atau antara hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam penelitian ini indikator efisiensi menunjuk kepada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh pemerintah desa terutama SDM, biaya, sarana kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan atau ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Penggunaan SDM perangkat desa untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah desa belum optimal. Aparat perangkat desa belum sepenuhnya terkonsentrasi melaksanakan tugas karena masih melaksanakan pekerjaan lain. (2) Penggunaan dana/keuangan pemerintah desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa. Kepala Desa masih sering mengalihkan penggunaan dana/anggaran untuk kegiatan lain yang tidak ada dalam APB Desa. (3). Penggunaan sarana kerja belum efisien karena sarana kerja yang ada sangat terbatas dan tidak memadai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator efisiensi nampaknya juga masih belum optimal.

Aspek yang perlu digaris bawahi dari hasil penelitian tersebut adalah penggunaan SDM aparat desa belum maksimal. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa dan juga para aparat perangkat desa bahwa keadaan tersebut terjadi karena para aparat perangkat desa belum terkonsentrasi penuh pada tugas karena masih harus membagi waktu untuk melaksanakan pekerjaan/usaha yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Hal demikian mereka lakukan karena belum ada gaji tetap sebagai aparat desa, sedangkan tunjangan yang diterima dirasakan sangat kecil/rendah. Implikasi dari hasil temuan penelitian tersebut adalah ke depan para aparat perangkat desa harus diberi penghasilan tetap (gaji) dan tunjangan yang memadai. Pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa juga harus rutin tiap bulan.

3. Adaptasi/fleksibilitas

Sebagai kriteria/indikator efektivitas organisasi adaptasi/fleksibilitas tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan eksternal maupun dalam lingkungan internal organisasi itu sendiri Gibson dkk, (2002). Dalam penelitian ini adaptasi/flksibilitas dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi dan menangani persoalan yang muncul di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kemampuan adaptasi pemerintah desa dalam menghadapi peningkatan tugas masih rendah. (2) Penugasan tertentu dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa namun hasilnya seringkali tidak maksimal. (3) Pemerintah desa juga masih kurang tanggap terhadap perkembangan atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Penanganan atau penyelesaian terhadap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat masih lambat.

Temuan penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobalos dilihat dari indikator adaptasi/fleksibiitas masih kurang baik atau rendah. Rendahnya kemampuan adaptasi/flksibilitas tersebut disebabkan terutama oleh masih rendahnya kemampuan SDM aparat pemerintah desa; karena itu ke depan perlu peningkatan kualitas SDM aparat desa untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari

indikator “produksi” masih kurang baik. Realisasi program/kegiatan pemerintah desa yang ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat umumnya belum optimal.

2. Efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “efisiensi” masih kurang baik. Penggunaan sumberdaya organisasi (SDM perangkat desa, dana/keuangan, dan sarana kerja) belum dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
3. Efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator kemampuan adaptasi/fleksibilitas pemerintah desa juga masih kurang baik. Perubahan atau peningkatan tugas serta permasalahan yang muncul di masyarakat belum secara optimal dapat ditangani dan diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tobelos, yaitu :

1. Kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau penataran.
2. Sumber penerimaan keuangan pemerintah desa seperti ADD dan sumber penerimaan lainnya yang diamanatkan dalam UU.No.6 Tahun 2004 hendaklah dioptimalkan.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa hendaklah diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang memadai.
4. Sarana kerja pada kantor kepala desa perlu disediakan dengan memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- .Gibson L.J.,dkk, 2002, *Organization*,
terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gie The Liang, dkk, 1992, *Ensiklopedi
Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat Soewarno, 1999, *Administrasi
Pemerintahan Dalam Pembangunan
Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Kencana,Inu, 2003, *Kepemimpinan
Pemerintahan Indonesia*, Rafika
Aditama, Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2008, *Enam Dimen
Administrasi Publik, Konsep, Teori dan
Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian
Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 2002, *Analisis Data
Kualitatif*, Jakarta, UI-Press.
- Riggs, F.W. 1999, *Administrasi Pembangunan*,
terjemahan, LP3ES, Jakarta.
- Siagian, S. P. 2000, *Filsafat Administrasi*,
Gunung Agung, Jakarta.
- Thoha, M., 1998, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu
Administrasi : Suatu Bunga Rampai
Bacaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tjokroamidjojo,Bintoro, 2002, *Pengantar
Administrasi Pembangunan*, LP3ES,
Jakarta.
- Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
Alfabeta. Bandung.

Sumber lain:

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
- Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6
Tahun 2014 tentang Desa.